



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna atas nama Umi Fajri Ramadanti, S.E., M.Ak selaku Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik diperlukan penyesuaian pada Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1135 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 550/SDM.09-SPt/21/3/2026 telah memberi perintah Sdr. Nina Gusnita, S.Ak sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai

tanggal 28 Agustus 2026 atau sampai ditetapkannya pejabat definitif;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Umum Kabupaten Natuna Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1135 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2026 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik;
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 31 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

KUSNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Givantri Zukma



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 1 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Kusnaidi, S.T., M.A.P	Ketua KPU Kabupaten Natuna	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Bahrul Amin, S.E,Sy.	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
3.	Tomi Yanto, S.T	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah merangkap panggota	Pengarah
4.	Raja Devi Alfitra, S.T	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
5.	Eryanto, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Yulius Hariyo Setiyo Pambudi, SE	Sekretaris KPU Kabupaten Natuna	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Givantri Zukma, S.Kom	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Faishal Luthfianwar, S.I.P	Plt.Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Dwi Ari Baskoro, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Deni Riadi, S.E.Sy	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	Dicky Kurniadi, S.Mn	PPNPN	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Tri Yuza Kasnuharda, S.H	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna - Melakukan Pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna
2.	Givantri Zukma, S.Kom	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Bayu Eka Pambudi, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Hosse Milennio, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota	
5	Lola Triartini Lumban Gaol, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota	
6.	Viktor Setya Dharma, A.Md	Pengadministrasi Umum	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Givantri Zukma, S.Kom	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Faishal Luthfianwar, S.I.P	Plt.Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Dwi Ari Baskoro, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Deni Riadi, S.E.Sy	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	Dicky Kurniadi, S.Mn	PPNPN	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Givantri Zukma, S.Kom	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan Pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Nina Gusnita, S.Ak	Plt.Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Gita Rosani Farma, S.E	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4.	Oktarian Yulhendrik, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	Dicky Refelino Putra, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
6.	Eva Arianti, S.E, Sy	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
7.	Dodi Santoso, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota	
8.	Wulandari	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
9.	Dini Afri Yulia	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Givantri Zukma, S.Kom	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun system dan proses
2.	Tri Yuza Kasnuharda, S.H	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Gunawan Wibisono, S.Si	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Ardiansyah	Operator Layanan Operasional	Anggota	Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
5.	Julinda Dayanti, S.H	PPNPN	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Faishal Luthfianwar, S.I.P	Plt.Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna - Meningkatkan Peran Aparar Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Givantri Zukma, S.Kom	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Bayu Eka Pambudi, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Hosse Millennio, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota	
5.	Lola Triartini Lumban Gaol, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota	
6.	Viktor Setya Dharma, A.Md	Pengadministrasi Umum	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Givantri Zukma, S.Kom	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna
2.	Nina Gusnita, S.Ak	Plt.Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Gita Rosani Farma, S.E	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Oktarian Yulhendrik, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	Dicky Refelino Putra, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
6.	Eva Arianti, S.E, Sy	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
7.	Dodi Santoso, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota	
8.	Wulandari	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
9.	Dini Afri Yulia	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Tri Yuza Kasnuharda, S.H	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Givantri Zukma, S.Kom	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Nina Gusnita, S.Ak	Plt.Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Faishal Luthfianwar, S.I.P	Plt.Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Bayu Eka Pambudi, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
6.	Gita Rosani Farma, S.E	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
7.	Dwi Ari Baskoro, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
8.	Oktarian Yulhendrik, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
9.	Dicky Refelino Putra, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
10.	Hosse Milennio, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
11.	Lola Triartini Lumban Gaol, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
12.	Viktor Setya Dharma, A.Md	Pengadministrasi Umum	Anggota	
13.	Rudi Hartono, S.Pd.I	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
14.	Eva Arianti, S.E, Sy	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
15.	Deni Riadi, S.E.Sy	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
16.	Gunawan Wibisono, S.Si	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
17.	Dodi Santoso, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota	
18.	Azman	Operator Layanan Operasional	Anggota	
19.	Muhammad Fahrul Rozi	Operator Layanan Operasional	Anggota	
20.	Ardiansyah	Operator Layanan Operasional	Anggota	
21.	Wulandari	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
22.	Dini Afri Yulia	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
23.	Dicky Kurniadi, S.Mn	PPNPN	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
24.	Julinda Dayanti, S.H	PPNPN	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Yulius Hariyo Setiyo Pambudi, SE	Sekretaris KPU Kabupaten Natuna	Ketua	Ketua
2.	Givantri Zukma, S.Kom	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat Rencana Aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan Bersama tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi
3.	Tri Yuza Kasnuharda, S.H	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Faishal Luthfianwar, S.I.P	Plt.Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Nina Gusnita S.Ak	Plt.Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 31 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Givantri Zukma

ttd.

KUSNAIDI